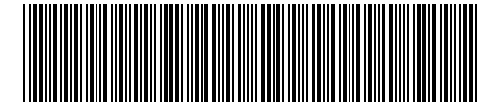




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408777/2019**



DS:9824-7165-0809-9679

Revisi ke 02

Tanggal : 30 April 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 3. Provinsi | : (19) | SULAWESI SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408777) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
| Sebesar | : Rp. | 158.591.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	158.591.000
Rp.	158.591.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 158.591.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAKASSAR II | (136) Rp. | 158.591.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408777) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : SAFRI
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. H. ABD. RAHMAN L. MH

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			158.591.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			158.591.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			158.591.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	4	RUU	
	02	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
	03	Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)	4	RUU	
	02	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan Sesuai dengan Permohonan	80	%	
	03	Persentase (%) Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi Sesuai Standar	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			158.591.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan			
	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	30 Raperda		142.190.000
Indikator Output Kegiatan	01	persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	677	raperda	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	50 Orang		16.401.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	1052	Orang	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019

I B. SUMBER DANA



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408777) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	158.591.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	158.591.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408777) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408777	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	158.591	-	-	-	158.591		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	158.591	-	-	-	158.591		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	158.591	-	-	-	158.591		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	142.190	-	-	-	142.190	19.51	
01	RM	-	142.190	-	-	-	142.190	136	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	16.401	-	-	-	16.401	19.51	
01	RM	-	16.401	-	-	-	16.401	136	
JUMLAH		-	158.591	-	-	-	158.591		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408777) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

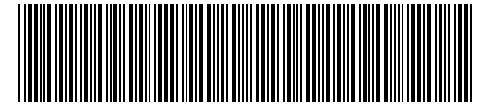
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408777	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	13.050	35.020	11.802	12.894	27.851	12.654	10.132	23.699	10.199	1.290	158.591
		52 BELANJA BARANG	0	0	13.050	35.020	11.802	12.894	27.851	12.654	10.132	23.699	10.199	1.290	158.591
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	0	0	13.050	35.020	11.802	12.894	27.851	12.654	10.132	23.699	10.199	1.290	158.591
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	13.050	35.020	11.802	12.894	27.851	12.654	10.132	23.699	10.199	1.290	158.591

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019
IV A. B L O K I R**



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408777] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

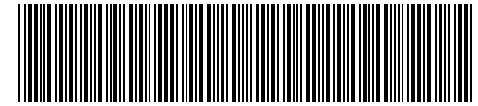
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:9824-7165-0809-9679

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408777] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001